

## Evaluasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada dalam Manajemen Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Jawa Timur

Audy Rizky Titania<sup>1</sup>, Ertien Rining Nawangsari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 22041010047@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, ertien\_rining.adneg@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 01 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

Accepted: 02 Februari 2025

**Keywords:** Pilkada Serentak, SILOG Pilkada, Manajemen Logistik, Komisi Pemilihan Umum

**Abstract:** Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Provinsi Jawa Timur 2024 menekankan pentingnya manajemen logistik yang efektif untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerapkan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada sebagai inovasi teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan berbagai logistik Pilkada yang efisien dan transparan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai implementasi SILOG Pilkada menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1971 untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 5 informan yang mencakup Kasubbag Umum dan Logistik, 2 Operator SILOG, dan 2 mahasiswa magang yang menjadi Operator SILOG Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILOG Pilkada meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelacakan logistik. Namun, terdapat kendala signifikan seperti infrastruktur teknologi yang tidak memadai, pelatihan sumber daya manusia yang kurang efektif, dan gangguan teknis dalam penggunaan sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu melakukan penguatan pelatihan operator, pengembangan sistem, serta penyederhanaan fitur sistem untuk memastikan efektivitas SILOG Pilkada dalam mendukung perkembangan SILOG Pilkada.

### PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Hal ini selaras dengan salah satu misi KPU, yaitu: “Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.” Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dibentuk sebagai badan nasional, tetap, dan independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, dan untuk memilih Gubernur, Bupati, serta Walikota secara demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara di era Reformasi Indonesia. Sebagai bagian dari sistem demokrasi perwakilan, Pilkada memungkinkan masyarakat memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Eko (2006) dalam (Haboddin & Rozuli, 2023) mengatakan Pilkada sebagai praktik elektoral di aras lokal yang bekerja dalam arena desentralisasi dan demokrasi lokal. Sedangkan Horowitz (2014) dalam (Haboddin & Rozuli, 2023) memaknai Pilkada sebagai praktik elektoral lokal yang beroperasi dalam kerangka desentralisasi dan demokrasi lokal. (Sutrisno, 2017) menegaskan bahwa Pilkada dirancang untuk memastikan kepala daerah terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Pada proses pelaksanaannya, Pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk mencari pemimpin daerah tetapi juga mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif dan transparan (Nugroho, 2021).

Logistik Pilkada, seperti yang telah dibahas dalam banyak karya literatur, adalah alat untuk mengubah suara menjadi kursi. Inilah sebabnya mengapa fokus pada pengembangan manajemen logistik yang efektif adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pilkada dalam kondisi apapun (Fitriani, 2020). Dattorna dan Walters (1996) menegaskan bahwa logistik merupakan komponen yang diperlukan dan telah dirancang khususnya untuk memenuhi persyaratan Pemilu. Hal ini harus dilaksanakan dan dikelola secara efektif untuk memastikan kebutuhan perusahaan. Logistik merupakan komponen penting dari agenda Pilkada, logistik akan sesuai dengan target dan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh laporan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu bertugas untuk menjamin kelancaran operasional proses manajemen logistik (Zulkarnaen, 2020). Pengaturan logistik teknis Pilkada bergantung pada PKPU No. 12 Tahun 2024. Pengelolaan logistik pilkada yang efektif memiliki peran krusial dan strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu, dimana prosedurnya terdiri dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pendistribusian.

Manajemen logistik adalah kunci keberhasilan Pilkada, mencakup perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan distribusi logistik seperti surat suara, kotak suara, dan bilik suara. Di Jawa Timur, dengan 31,2 juta pemilih dan lebih dari 60.751 TPS di 38 Kabupaten/Kota, tantangan logistik menjadi kompleks akibat keragaman geografis, wilayah terpencil, dan daerah rawan bencana. Kendala utama meliputi distribusi ke daerah terpencil, pengawasan, serta keterbatasan SDM dan teknologi. Untuk itu, KPU harus membangun sistem logistik yang efisien dan terintegrasi guna memastikan distribusi berjalan lancar.

Era modernisasi dan tuntutan efisiensi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menciptakan Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagai solusi berbasis teknologi untuk membantu administrasi logistik pilkada di era modernisasi dan tuntutan efisiensi. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 menetapkan “Aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut SILOG Pilkada sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan Oleh; Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. SILOG Pilkada merupakan aplikasi khusus yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi

---

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

SILOG Pilkada, sesuai dengan PKPU 12/TIK.03/14/2022, dirancang untuk mencakup seluruh tahapan manajemen logistik, seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi, distribusi, dan pemantauan. Dengan menggunakan SILOG Pilkada, KPU dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah koordinasi antar level melalui akses dan pemantauan data logistik secara real-time. KPU dapat mempercepat pengambilan keputusan dan memfasilitasi proses koordinasi antar level dengan mengakses dan memantau data logistik secara *real-time* melalui pemanfaatan SILOG Pilkada.

Namun demikian, penerapan SILOG Pilkada dalam Pilkada Serentak 2024, khususnya di daerah luas seperti Provinsi Jawa Timur menghadirkan berbagai kendala. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidaksesuaian data logistik antara sistem dan kebutuhan riil di lapangan, kapasitas infrastruktur teknologi, minimnya pelatihan bagi operator SILOG Pilkada, menu-menu yang ada di dalam aplikasi/*website*, koordinasi antar penyelenggara di tingkat kabupaten/kota menjadi hal yang perlu dievaluasi. Dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, evaluasi kinerja SILOG Pilkada menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini diharapkan mampu mengatasi kendala sebelumnya serta meningkatkan akurasi data, efisiensi waktu, dan transparansi dalam manajemen logistik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas SILOG Pilkada, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menawarkan gagasan untuk menyempurnakan sistem untuk memfasilitasi Pilkada yang lebih efektif dan efisien

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan Publik

Beragam ahli memiliki definisi yang berbeda tentang kebijakan publik, meskipun terdapat kesamaan fokus dalam konsepnya. Perbedaan ini muncul dari sudut pandang yang beragam dalam mendefinisikan kebijakan publik. W.I Jenkins, seperti dikutip (Armanto, 2018), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang terintegrasi, dibuat oleh aktor politik atau kelompok aktor dengan tujuan tertentu, termasuk metode untuk mencapainya dalam konteks tertentu. Dye (1992:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"whatever governments choose to do or not to do."* Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (1984:18) mengungkapkan hal serupa, bahwa kebijakan publik adalah *"what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs,"* yang mencerminkan tujuan atau sasaran program pemerintah. Kebijakan publik merujuk pada keputusan strategis yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui tindakan langsung maupun pilihan untuk tidak bertindak.

Kebijakan mengenai penerapan SILOG Pilkada diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024, yang menetapkan Aplikasi SILOG Pilkada sebagai *platform* khusus untuk digunakan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dikelola oleh KPU di berbagai tingkatan. Selain itu, pengaturan terkait Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada juga tertuang dalam PKPU 12/TIK.03/14/2022 tentang “Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025.” Kebijakan ini menjabarkan tugas dan fungsi SILOG Pilkada, meliputi seluruh proses manajemen logistik, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengelolaan inventaris, distribusi, hingga pemantauan.

### Evaluasi Program

Menurut (Nurhasan, 2001:3) dalam (Muryadi, 2017) evaluasi adalah metode atau proses yang digunakan untuk memastikan dan mengukur suatu entitas dalam konteks yang ditentukan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil evaluasi sering kali menghasilkan informasi tentang

---

sifat atau sifat individu atau hal yang dipermasalahkan. Selain tes, data juga dapat dikumpulkan dengan kuesioner, observasi, wawancara, atau alat lainnya. Djaali, Mulyono, dan Ramly (2000:3) juga menggambarkan evaluasi sebagai proses penilaian entitas sesuai dengan kriteria atau norma objektif yang ditetapkan. Evaluasi adalah investigasi metodis tentang kebenaran atau kemandirian suatu tujuan. Evaluasi adalah teknik yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan program dapat dicapai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi adalah pengukuran dan penilaian sistematis suatu entitas terhadap kriteria tertentu untuk memastikan tingkat pencapaian atau efektivitas tujuan, menggunakan berbagai instrumen dan metodologi terkait (Tayibnapis, 2008).

Arikunto & Jabar (2010) dalam (Muharika, 2019) suatu program didefinisikan sebagai unit atau unit kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang jika berhubungan langsung dengan evaluasi program. Program adalah sistem yang merupakan kumpulan sub-sub-sistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kegiatan dalam suatu organisasi, karena merupakan unit atau unit kegiatan. Untuk memastikan bahwa program dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan tujuan organisasi, sangat penting untuk menerapkan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan dengan sasaran suatu program disebut dengan evaluasi program. *evaluation program* berfungsi untuk menemukan pertanyaan terkait, menentukan data yang diperlukan, mengevaluasi data, dan menetapkan penerapan data yang diperoleh (Bryson, 2010). Dari pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah proses sistematis untuk menilai pelaksanaan dan pencapaian program sebagai sebuah sistem, dengan tujuan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengambilan keputusan organisasi dan perbaikan berkelanjutan.

#### **Evaluasi Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*)**

Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) adalah kerangka evaluasi yang dirancang oleh Daniel L. Stufflebeam pada tahun 1971. CIPP merupakan metodologi evaluasi yang menggunakan teknik evaluasi berorientasi manajemen dan dianggap sebagai semacam penilaian manajemen program. Model CIPP berpendapat bahwa tujuan utama evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan menaikkan (*to improve*). Oleh karena itu, pendekatan ini diklasifikasikan dalam evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (Rafiqi & Selviyanti, 2021). Evaluasi model CIPP ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi di setiap komponen evaluasi, yang meliputi: (1) Evaluasi konteks (*evaluation context*) untuk keputusan perencanaan, mengumpulkan data tentang perencanaan program, kebutuhan yang mendasari serta peraturan yang mendukung; (2) Evaluasi masukan (*evaluation Input*) untuk menyusun keputusan, mengidentifikasi sumber daya potensial yang mendukung program; (3) Proses Evaluasi (*evaluation process*) untuk keputusan implementasi, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program dan revisi yang diperlukan untuk perbaikan. (4) Evaluasi produk (*evaluation product*) untuk memperoleh informasi tentang hasil yang dicapai dan menawarkan rekomendasi untuk kelanjutan program (Aw, 2018).

SILOG Pilkada dalam evaluasi konteks, mencakup analisis kebutuhan logistik pemilu, peraturan yang mendukung implementasi SILOG, dan kondisi awal yang memengaruhi perencanaan sistem. Evaluasi masukan bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, seperti teknologi, infrastruktur, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung operasional SILOG Pilkada. Identifikasi masukan ini membantu menyusun keputusan strategis terkait implementasi. Proses evaluasi berfokus pada pelaksanaan SILOG Pilkada, termasuk kendala yang muncul selama implementasi serta revisi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Hasil evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan SILOG Pilkada di masa depan. Dengan mengintegrasikan Model CIPP ke dalam evaluasi SILOG Pilkada,

.....

kebijakan publik dapat lebih terarah dalam meningkatkan kualitas manajemen logistik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi SILOG Pilkada dalam monitoring manajemen logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas, kendala, serta peluang pengembangan SILOG dalam mendukung pengelolaan logistik Pilkada. Penelitian dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur serta sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pendistribusian logistik. Sumber data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer berasal dari wawancara mendalam dengan 5 informan yaitu, Kasubbag Umum dan Logistik, 2 Staf Subbagian Umum dan Logistik yang menjadi Operator SILOG Pilkada, serta 2 Mahasiswa Magang yang menjadi Operator SILOG Pilkada selama Pilkada Serentak Tahun 2024. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria meliputi pengalaman langsung dalam pengelolaan logistik Pilkada dan keterlibatan sebagai operator SILOG Pilkada.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi, antara lain peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, majalah atau artikel ilmiah, berita, dokumen dinas instansi, dan situs resmi instansi, yang semuanya relevan dengan SILOG KPU Provinsi Jawa Timur Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles Huberman dalam (Annisa & Mailani, 2023) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pengecekan ulang data kepada informan. Reabilitas data dijaga dengan mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Model evaluasi CIPP merupakan salah satu strategi untuk menilai program yang ada dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1971 ini didasarkan pada empat dimensi yaitu, *Context, Input, Process, Product*. Berikut tabel operasional parameter berdasarkan teori Stufflebeam 1971.

**Tabel 1. Operasional Parameter**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>	<b>Sumber Data</b>
Evaluasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada 2024	<i>Evaluasi context</i>	Mencakup analisis kesesuaian tujuan sistem dengan kebutuhan organisasi.	Kasubbag Umum dan Logistik, Staff Subag Umum dan Logistik yang menjadi operator, serta Mahasiswa Magang Umum dan Logistik yang menjadi operator SILOG Pilkada 2024
	<i>Evaluasi Input</i>	Cakupan sumber daya manusia, sarana-peralatan, dan pelatihan yang diberikan ke operator.	
	<i>Evaluasi process</i>	Proses rancangan program, pelaksanaan program, siapa, kapan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program.	
	<i>Evaluasi product</i>	Tingkat kepuasan operator, masukan, kelebihan dan kekurangan, serta dampak jangka panjang.	

Sumber: Hasil Olahan Peneliti berdasarkan teori Stufflebeam 1971.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan dan mengkaji temuan kajian mengenai Evaluasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada dalam Manajemen Logistik Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan di KPU Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, manajemen logistik merupakan faktor penting yang mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan proses pemilu. Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan logistik, meliputi perencanaan, pengadaan, dan distribusi kebutuhan logistik pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa SILOG Pilkada merupakan inovasi penting dalam memfasilitasi pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2024. SILOG telah secara efektif mengatasi sebagian besar tantangan yang sebelumnya dihadapi dalam manajemen manual, terutama mengenai efisiensi dan akurasi data. Namun, evaluasi juga menunjukkan adanya tantangan besar yang harus diatasi, terutama dalam hal pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan fitur sistem yang lebih adaptif. Hasil evaluasi implementasi SILOG Pilkada di analisis sesuai dengan komponen evaluasi model CIPP.

### 1. Evaluasi Context

SILOG Pilkada merupakan program khusus yang dirancang untuk bantuan logistik dalam pelaksanaan pemilu. Program ini dikembangkan pada tahun 2008 dan digunakan dalam Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pemilu 2017, serta terakhir digunakan pada Pemilu 2019. Secara nasional, SILOG Pilkada digunakan di seluruh 38 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten Kota di Indonesia. Berdasarkan data sekunder, sebanyak 38 KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diwajibkan menggunakan SILOG Pilkada. SILOG Pilkada juga membantu dalam mengelola logistik pemilu, yang meliputi perencanaan, penilaian persyaratan, penganggaran, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen inventaris. Penerapan SILOG Pilkada didasari oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan logistik Pilkada. SILOG Pilkada dimaksudkan untuk mengatasi tantangan yang sering muncul dalam administrasi manual, termasuk pencatatan ketidakakuratan dan keterlambatan pengiriman logistik ke daerah. Selain itu, kebijakan terkait SILOG Pilkada juga diatur dalam PKPU 12/TIK.03/14/2022 tentang “Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025.” Kebijakan ini memberikan ketentuan mengenai tugas dan fungsi utama SILOG Pilkada dan siapa saja yang menggunakan SILOG Pilkada. Pengguna SILOG Pilkada meliputi berbagai pihak, seperti KPU RI, Admin KPU RI, operator KPU, tim verifikasi KPU RI, *helpdesk* KPU RI, admin KPU Provinsi, operator KPU Provinsi, Admin KPU Kabupaten/Kota, operator KPU Kabupaten/Kota, serta operator *Supplier*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penerapan SILOG dinilai relevan dengan isu-isu yang dihadapi, terutama dalam memastikan keberlanjutan proses Pilkada yang demokratis dan transparan. Peraturan KPU yang memfasilitasi digitalisasi dalam manajemen logistik membangun kerangka kerja yang kuat untuk pelaksanaan SILOG Pilkada. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan ini di tingkat daerah masih terbatas, sehingga upaya penyelarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan menjadi tantangan penting.

### 2. Evaluasi Input

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam memfasilitasi keberhasilan SILOG Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelatihan teknis secara langsung di Yogyakarta pada bulan Agustus 2024. Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan tersebut tidak efektif. Hambatan

.....

utama dalam pelatihan SILOG Pilkada mengalami gangguan (server down) dan jaringan internet yang tidak stabil selama pelatihan berlangsung. Kondisi ini menghambat akses operator ke sistem dengan lancar, sehingga tujuan pelatihan untuk memperdalam pemahaman teknis dan keterampilan operator SILOG Pilkada tidak tercapai sepenuhnya. Pelatihan juga disampaikan menggunakan materi video dan panduan berupa PowerPoint (PPT), yang dianggap kurang efektif untuk memastikan penguasaan teknis pengguna. Operator dilapangan harus memperoleh pengetahuan secara mandiri, tanpa bimbingan atau instruksi praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dari segi infrastruktur, perangkat keras seperti komputer dan perangkat lunak sistem telah tersedia dengan baik. Namun, konektivitas internet menjadi kendala utama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana akses jaringan sering kali lambat atau bahkan tidak tersedia. Selain itu, *website* SILOG Pilkada juga kerap mengalami *server down* akibat dari banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan, sehingga menghambat tugas operator untuk terus mengontrol pengiriman yang sedang berlangsung. Keadaan ini menunjukkan bahwa *input* pendukung implementasi SILOG Pilkada, terutama dalam aspek pelatihan teknis dan ketersediaan jaringan internet, belum optimal untuk memastikan keberhasilan sistem di semua wilayah. Metode pelatihan interaktif yang ditingkatkan, termasuk simulasi praktis atau bimbingan teknis sangat penting untuk meningkatkan kemahiran operator dalam pengoperasian sistem.

### 3. Evaluasi Process

Proses implementasi SILOG Pilkada telah berjalan sesuai dengan rencana awal, dengan fokus pada pencatatan, pengolahan, dan distribusi data logistik Pilkada. Sistem ini telah menunjukkan kemampuan untuk mempercepat pemrosesan data logistik, seperti jumlah kebutuhan pengadaan logistik Pilkada, kontrak pengadaan, daftar produksi, daftar rencana pengiriman, daftar hasil sortir, serta pelacakan distribusi logistik di lapangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa gangguan teknis sering kali terjadi Provinsi dan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota, seperti keterlambatan respons sistem atau ketidakmampuan mengakses fitur tertentu. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan kinerja SILOG Pilkada secara berkala, namun laporan dari tingkat Kabupaten/Kota sering kali tidak konsisten, baik dari segi waktu pengiriman maupun kelengkapan data. Terjadi gangguan server (*server down*) selama pelaksanaan distribusi juga merupakan salah satu kendala teknis. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan sistem untuk memantau distribusi logistik ke PPK, PPS, dan TPS. Akibatnya, proses pemantauan menjadi tidak lancar, sehingga menciptakan kekhawatiran terhadap potensi keterlambatan atau kesalahan dalam distribusi logistik di daerah-daerah tersebut. Selain itu, operator menilai beberapa menu di dalam SILOG Pilkada tidak efektif karena terlalu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengakses informasi. Contohnya pada menu "Daftar Rencana Pengiriman," di mana terdapat terlalu banyak kode pengiriman yang terpisah di setiap penyedia logistik. Hal ini membuat proses identifikasi pengiriman menjadi lambat dan membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan sistem membutuhkan peningkatan melalui proses yang lebih terorganisir dan adaptif. Penelitian terdahulu oleh (Haryanto, 2024) mengungkapkan bahwa sistem logistik berbasis digital yang efektif membutuhkan proses pemantauan yang adaptif, yang juga relevan dengan temuan penelitian ini.

### 4. Evaluasi Product

Hasil implementasi SILOG Pilkada menunjukkan bahwa sistem ini hanya berhasil memberikan manfaat sebagian, terutama dalam membantu mengetahui kedatangan barang logistik di satuan kerja (satker). Fungsi utama sistem lebih terfokus pada pengelolaan informasi kedatangan barang, sedangkan aspek-aspek lain, seperti distribusi logistik ke Kabupaten/Kota belum mampu dijalankan secara optimal. Operator mengakui bahwa SILOG Pilkada mempermudah pencatatan dan pelacakan barang logistik yang sudah tiba. Namun, sistem ini tidak cukup banyak membantu

.....

dalam mengantisipasi kendala operasional, seperti keterlambatan distribusi logistik ke beberapa wilayah yang sulit untuk dijangkau. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pengembangan SILOG Pilkada masih perlu dilakukan, khususnya dalam memperluas fungsionalitas sistem agar tidak hanya berfokus pada kedatangan barang, tetapi juga mendukung pengelolaan logistik secara menyeluruh, termasuk dalam aspek distribusi. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memperluas fungsionalitas sistem agar mencakup aspek distribusi logistik yang lebih komprehensif. Penelitian terdahulu oleh (Herold, 2021) juga menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi dengan teknologi pemantauan *real-time* untuk memastikan efisiensi distribusi logistik.

## KESIMPULAN

Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada merupakan inovasi yang diperkenalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memudahkan manajemen logistik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP:

1. Evaluasi *Context*: SILOG Pilkada relevan dengan kebutuhan logistik Pilkada, namun pemahaman terhadap kebijakan di tingkat daerah masih terbatas, sehingga koordinasi perlu ditingkatkan.
2. Evaluasi *Input*: Pelatihan teknis untuk operator belum memadai, ditambah dengan kendala infrastruktur teknologi seperti konektivitas internet yang sering tidak stabil. *Website* SILOG Pilkada yang kerap mengalami gangguan juga menjadi penghambat operasional.
3. Evaluasi *Process*: Proses pencatatan dan pelacakan logistik telah terakselerasi, namun gangguan teknis dan koordinasi antarlevel masih menjadi hambatan utama.
4. Evaluasi *Product*: SILOG Pilkada mempermudah pencatatan logistik, tetapi belum sepenuhnya mendukung distribusi logistik secara efektif di lapangan.

SILOG Pilkada memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam manajemen logistik Pilkada, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SILOG Pilkada masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi dalam infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang tidak memadai, pelatihan teknis yang tidak memadai untuk operator, dan kendala operasional seperti server down dan menu sistem yang dinilai kurang efektif. Selain itu, pemahaman kebijakan yang tidak memadai di tingkat daerah menimbulkan kesenjangan dalam implementasi SILOG Pilkada di lapangan. Adapun keterbatasan penelitian ini mencakup minimnya data untuk mendukung analisis, terbatasnya wawasan dari penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding, serta cakupan wilayah yang hanya melibatkan satu provinsi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain.

Secara keseluruhan, meskipun SILOG Pilkada berhasil mempercepat manajemen logistik dan meningkatkan akurasi data, masih diperlukan berbagai upaya perbaikan agar sistem ini dapat mendukung penyelenggaraan Pilkada secara lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan SILOG Pilkada, yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi  
Berdasarkan kendala server yang sering mengalami gangguan (*server down*) dan konektivitas internet yang tidak stabil, disarankan untuk meningkatkan kapasitas server dan memperkuat akses jaringan di daerah-daerah.
2. Optimalisasi Pelatihan SDM  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan teknis saat ini belum efektif. Oleh karena itu, perlu diterapkan metode pelatihan interaktif seperti simulasi praktik dan bimbingan teknis yang lebih mendalam sebelum pelaksanaan Pilkada.

## 3. Pengembangan Sistem

Berdasarkan masukan dari operator, langkah-langkah pada menu SILOG Pilkada perlu disederhanakan agar lebih ramah pengguna.

**DAFTAR REFERENSI**

- Annisa, I. S., & Mailani, E. (2023). Analisis faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan metode Miles dan Huberman di kelas IV SD Negeri 060800 Medan Area. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6460–6477.
- Armanto, E. H., Salahudin, S., & Mulyono, H. (2018). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program One Village one Product Di Kabupaten Pasuruan). *LOGOS (Journal of Local Government Issues)*.  
[https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/NASKAH%20FIX%20ERICK%20\(1\)%20pdf\(1\).pdf](https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/NASKAH%20FIX%20ERICK%20(1)%20pdf(1).pdf)
- Aw, S. (2018). Evaluasi Program Desa Mandiri Informasi Berbasis Aplikasi Android Sistem Informasi Desa (Sifordes). *Informasi*, 48(1), 1–13.  
<https://scholarhub.uny.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=informasi>
- Bryson, J. M., Patton, M. Q., Newcomer, K. E., Hatry, H. P., & Wholey, J. S. (2010). *Handbook of practical program evaluation*.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 244–264.  
<https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373/387>
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2023). *Pilkada Serentak Jawa Timur*. Universitas Brawijaya Press.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=orHXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pilkada+jawa+timur&ots=DCLJ\\_COGSo&sig=KwQBz7Bh8xIjYzlsAjcXS0eUrk4&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pilkada%20jawa%20timur&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=orHXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pilkada+jawa+timur&ots=DCLJ_COGSo&sig=KwQBz7Bh8xIjYzlsAjcXS0eUrk4&redir_esc=y#v=onepage&q=pilkada%20jawa%20timur&f=false)
- Haryanto, H., Wahjoe Hapsari, D., & Hidayah, N. (2024). Unlocking the Power of Internal Control: How It Lowers Risk and Slashes Logistics Costs in Retail. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 5(2), 133–149. <https://doi.org/10.33476/jobs.v5i2.4819>
- Herold, D. M., Ćwiklicki, M., Pilch, K., & Mikl, J. (2021). The emergence and adoption of digitalization in the logistics and supply chain industry: an institutional perspective. *Journal of Enterprise Information Management*, 34(6), 1917–1938.
- Muharika, D. (2019). *Metodologi penelitian evaluasi program*. Alfabeta.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w37LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=evaluasi+program+sistem+informasi&ots=tlayEOBJwo&sig=pSHWEMd9clxIMFgh75Rs9\\_UCJJg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=evaluasi%20program%20sistem%20informasi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w37LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=evaluasi+program+sistem+informasi&ots=tlayEOBJwo&sig=pSHWEMd9clxIMFgh75Rs9_UCJJg&redir_esc=y#v=onepage&q=evaluasi%20program%20sistem%20informasi&f=false)
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(1).  
<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538>
- Nugroho, K., Dwi Windyastuti Budi Hendarti, M., Siti Aminah, M., Hendro Margono, M., Imam Subkhi, M., MIP Henry Wijaya, S., MIP Linda Rizky Mawardah, S., Rahayu Eka Sasmita, S., & Eunike Mustika Nugroho, S. (2021). *Penerapan Teknologi Informasi pada Pemilu 2019*.  
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/52/26>
- Rafiqi, I., & Selviyanti, N. H. (2021). Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 1(2), 115–138.  
<https://www.ejournal.unia.ac.id/index.php/Assyarikah/article/view/381/274>

- Sutrisno, C. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 36–48. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/509>
- Tayibnapi, F. Y. (2008). *Evaluasi program dan instrumen evaluasi untuk program pendidikan dan penelitian*.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 222–243. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/372>
-